

SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

HERIANTO



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**HERIANTO
A31107120**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

**HERIANTO
A 31107120**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Muh. Ishak Amsari, M.Si., Ak.
NIP 195511171987031001

Dr. Hj. Kartini, M.Si., Ak.
NIP 196503051992032001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Herianto
NIM : A31107120
jurusan/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
KUALITAS LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Mei 2013

Yang membuat pernyataan,



HERIANTO

PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Drs. Muh. Ishak Amsari, M.Si, Ak., dan Ibu Dr. Hj. Kartini, M.Si, Ak., sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., Bapak Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak., dan Bapak Drs. Asri Usman, M.Si., Ak., selaku penguji yang telah banyak memberikan saran, kritik dan perbaikan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada orang tua, saudara-saudari, Luisa Srinadya, S.H., anggota perhimpunan PMKRI Cabang Makassar, KMK Unhas, segenap keluarga, rekan dan sahabat, serta pihak-pihak lain yang tidak saya sebutkan atas bantuan, nasehat, motivasi dan doa yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga

semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Mei 2013

Herianto

ABSTRAK

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laba

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Effect of Good Corporate Governance on Earnings Quality of Listed Manufacturing Firm at the Indonesian Stock Exchange

Herianto
Muh. Ishak Amsari
Hj. Kartini

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari observasi (primer) laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan. Koefisien determinasi *Good Corporate Governance* (X) terhadap kualitas laba sebesar 0,312 atau 31,2 %. Variasi kualitas laba (Y) dapat dijelaskan oleh variabel ini sedangkan sisanya 68,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, keberadaan komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial

This research aims to analyze the effect of Good Corporate Governance on the earnings quality. Data used in this research were obtained from observation (primary) on financial report of listed manufacturing firm at Indonesia Stock Exchange. Research findings show that the variable of audit committee existence, proportion of non-board commissioner, institutional ownership and managerial ownership affect positively on earnings quality of the listed manufacturing firm. Coefficient determination of Good Corporate Governance on earnings quality is 31,2 %. Variation of earnings quality can be explained by this factor and 68,8% explained by other variables out of model.

Keywords: *Good Corporate Governance*, audit committee existence, proportion of non-board commissioner, institutional ownership, managerial ownership

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9
2.2 <i>Good Corporate Governance</i>	11
2.2.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	11
2.2.2 Maksud dan Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	13
2.2.3 Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.2.4 Asas <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.3 Kualitas Laba.....	16
2.4 Dimensi <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.4.1 Komite Audit.....	18
2.4.2 Proporsi Komisaris Independen.....	19
2.4.3 Kepemilikan Institusional.....	20
2.4.4 Kepemilikan Manajerial.....	21
2.5 Pengaruh Keberadaan Komite Audit Terhadap Kualitas Laba...	21
2.6 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba.....	23
2.7 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Laba....	26
2.8 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kualitas Laba.....	27
2.9 Penelitian Terdahulu	29
2.10 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Tempat dan Waktu	32
3.2 Populasi dan Sampel	32

3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	33
3.6 Analisis Data.....	34
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.7.1 Uji Normalitas	35
3.7.2 Uji Multikolonieritas	35
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas	36
3.7.4 Uji Autokorelasi.....	36
3.8 Pengujian Hipotesis.....	37
3.8.1 Uji Parsial (Uji t).....	37
3.8.2 Uji Koefisien Determinasi	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Statistik Deskriptif	38
4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	38
4.2.1 Uji Normalitas	38
4.2.2 Uji Multikolonieritas	39
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	40
4.2.4 Uji Autokorelasi.....	41
4.3 Uji Hipotesis.....	41
4.3.1 Uji Parsial (Uji t).....	41
4.3.3 Uji Determinasi	43
4.4 Analisis dan Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	46
5.3 Keterbatasan Penelitian	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Statistik Deskriptif	38
4.2 Hasil Uji Multikolonieritas.....	39
4.3 Durbin-Watson test (Uji DW)	41
4.4 Uji Parsial (Uji t)	42
4.5 Uji Determinasi (R^2)	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	31
4.1 <i>Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual</i>	39
4.2 <i>Scatterplot</i>	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Data-data Perusahaan	67
2	Hasil Output SPSS	72
3	Biodata	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2002, publikasi keuangan di Amerika dipenuhi oleh skandal-skandal dan kecurangan akuntansi. Pada mulanya dimulai oleh Enron kemudian menyebar hingga Global Crossing, Kmart, WorldCom, William Cos dan Xerox. Perusahaan-perusahaan ini diteliti oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) karena masalah akuntansi, yang menyebabkan harga saham semua perusahaan tersebut menurun secara drastis. Akibat dari skandal ini adalah munculnya kekhawatiran akan semakin banyaknya jumlah kecurangan yang menjadi perhatian masyarakat luas yang kemudian berkembang menjadi rasa tidak percaya terhadap laporan keuangan (Donald *et al.*, 2007)

Perhatian publik atas skandal-skandal akuntansi yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar ini menjelaskan seberapa penting pelaporan akuntansi bagi Amerika Serikat dan pasar keuangan global serta masyarakat secara keseluruhan. Tanpa laporan keuangan, para manajer tidak akan dapat mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan atau mengambil keputusan mengenai cara terbaik untuk membuat perusahaan berkembang di masa depan. Tanpa laporan keuangan, investor dan kreditor tidak akan dapat mengambil keputusan tentang bagaimana cara mereka mengalokasi dana. Sudah dapat dipastikan bahwa suatu perekonomian yang stabil dan dapat berfungsi dengan baik akan bergantung pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Ada beberapa hal yang mengemuka tentang tujuan pendirian suatu perusahaan. Tujuan perusahaan terdiri dari:

- a. untuk mencapai keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar-besarnya
- b. memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham
- c. memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya.

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Brigham, 1999 dalam Wahyudi dan Pawestri, 2006). Peningkatan kesejahteraan pemilik tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi untuk mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Laba sebagai bagian dari laporan keuangan yang tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi perusahaan dapat diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. Jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Boediono, 2005).

Informasi tentang laba mempunyai peran yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan atau entitas bisnis. Pihak yang berkepentingan tersebut mencakup pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Pihak-pihak ini menggunakan informasi tentang laba sebagai dasar pengambilan keputusan, mengukur kinerja dan prestasi manajemen dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Informasi tentang laba dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan

yang telah ditetapkan (Parawijayati, 1996 dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006). Oleh karena itu, kualitas laba menjadi sangat penting karena dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan.

Pada perusahaan *go public* terdapat pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan. Fungsi kepemilikan dijalankan oleh pemegang saham selaku pemilik perusahaan sedangkan fungsi pengelolaan dijalankan oleh manajer. Dengan adanya pemisahan fungsi ini maka pemegang saham sebagai pemilik perusahaan akan memberikan wewenang kepada manajer selaku pengelola untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik perusahaan. Kewenangan yang dimiliki menyebabkan pihak pengelola atau manajer memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi sehubungan dengan operasi perusahaan.

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya sehingga hal ini memicu terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dengan *agent*.

Menurut *agency theory*, adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik yang disebut *agency*

conflict yang disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu *principal* (yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan *agent* (yang menerima kontrak dan mengelola dana *principal*) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Jika *agent* dan *principal* berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa *agent* (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Pemikiran bahwa pihak manajemen dapat melakukan tindakan yang hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri didasarkan pada asumsi yang menyatakan setiap orang mempunyai perilaku yang mementingkan diri sendiri atau *self-interested behaviour*.

Konflik keagenan dapat mengakibatkan adanya sifat manajemen melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Subramanyam (1996) dalam Siregar dan Utama (2005) menyatakan bahwa salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Laba yang diukur atas dasar akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih baik atas kinerja perusahaan dibanding metode arus kas operasi karena metode akrual mengurangi masalah waktu dan *mismatching* yang terdapat dalam penggunaan arus kas dalam jangka pendek.

Dalam prosesnya dasar akrual memungkinkan adanya perilaku manajer dalam melakukan rekayasa laba atau *earnings management* guna menaikkan atau menurunkan angka akrual dalam laporan laba rugi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kelonggaran (*flexibility principles*) dalam memilih metode akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Kelonggaran dalam metode ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai laba

yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Perusahaan yang memilih metode penyusutan garis lurus akan berbeda hasil laba yang dilaporkan dengan perusahaan yang menggunakan metode angka tahun atau saldo menurun. Praktik seperti ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas laba yang dilaporkan (Boediono, 2005).

Pandangan teori keagenan di mana terdapat pemisahan antara pihak *agent* dan *principal* yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan *principal*. Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Good Corporate Governance merupakan alat yang dapat menyelaraskan kepentingan yang berbeda antara *principal* dan *agent* sehingga dapat memberi nilai tambah bagi para *stakeholder* dan *shareholders*. *Good Corporate Governance* mencakup berbagai aspek seperti keberadaan komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen. Aspek-aspek ini kemudian akan menyelaraskan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik sehingga manajer akan mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Selain itu, peran *monitoring* dari struktur kepemilikan dalam penyusunan laporan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Laba yang berkualitas dapat membantu pihak internal dan eksternal dalam mengambil keputusan yang tepat.

Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007), komite audit, komisaris independen, struktur kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional

berpengaruh terhadap kualitas laba. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Selain itu, dengan adanya pengawasan yang baik terhadap proses pelaporan keuangan maka akan mempengaruhi informasi laba yang disajikan oleh perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta tatakelola yang baik di dalam perusahaan. Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Good Corporate Governance mengandung enam asas penting yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan dan diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001*).

Pemahaman mengenai bagaimana menyusun suatu mekanisme tatakelola yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan sangatlah penting. Hal inilah yang mendorong dilakukannya berbagai penelitian

yang bertujuan memberikan keyakinan mengenai adanya hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan kualitas laba. Oleh karena itu penulis tertarik memilih judul skripsi sebagai berikut: “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. untuk menganalisis pengaruh keberadaan komite audit terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3. untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan melengkapi berbagai analisis terutama yang berhubungan dengan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laba.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Bagi obyek penelitian, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur, termasuk para *stakeholder dan shareholder*, hasil penelitian ini dapat menjadi *feedback* yakni seberapa besar manfaat yang diperoleh atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* terutama sehubungan dengan kualitas laba. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman dan juga dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam rangka memahami *Good Corporate Governance* maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara *principal* dan *agent*. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan di pihak *principal*/investor dan pengendalian di pihak *agent*/manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, di mana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Arief dan Bambang (2007). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari *principal* dan *agent* berlawanan, (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi *principal* untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent*. Permasalahannya adalah bahwa *principal* tidak dapat memverifikasi apakah *agent* telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dengan demikian, *principal* dan *agent* mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan preferensi terhadap risiko.

Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara *principal* dan *agent*, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989 dalam Arief dan Bambang (2007), yaitu:

1. asumsi sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki keterbatasan rasional dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*)
2. asumsi organisasi, adalah konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*
3. asumsi informasi, adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.

Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan adanya tiga unsur tambahan yang dapat membatasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh *agent*, yaitu:

- 1) bekerjanya pasar tenaga manajerial akan menghapus kesempatan pengelola yang tidak mempunyai kinerja baik dan berperilaku menyimpang dari keinginan pemegang saham perusahaan yang dikelolanya
- 2) bekerjanya pasar modal secara efisien bisa menjadi cermin kinerja manajer dari harga saham perusahaannya
- 3) bekerjanya *market for corporate control* bisa menghambat tindakan menguntungkan diri pengelola sendiri dalam hal menghentikan pengelola dari jabatannya jika perusahaan yang dikelolanya mempunyai kinerja rendah yang memungkinkan pemegang saham baru menggantikannya dengan pengelola lain setelah perusahaan diambil alih.

Good Corporate Governance yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan menjadi alat yang dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan. Melalui penerapan *Good Corporate Governance*, investor meyakini bahwa manajer akan memberikan keuntungan atas dana yang diinvestasikan sebagai akibat dari kinerja perusahaan yang semakin meningkat. *Good Corporate Governance* juga berkaitan bagaimana investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menekan dan menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.2 Good Corporate Governance

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapannya juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *Good Corporate Governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang menerapkan *Good Corporate Governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menurut *Forum for Good Corporate Governance in Indonesia (2001)*, *Good Corporate Governance* adalah:

“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan

serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Good Corporate Governance sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis dan kebijakan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif (Tunggal dan Amin, 2002: 3).

Moeljono (2005: 88) mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* sebagai alat kelola usaha. Pieres (2008: 131) mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Konsep *Good Corporate Governance* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih dan bertanggung jawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Selain itu, tuntutan ini juga mencerminkan keheranan publik mengapa kasus penyimpangan korporasi biasa terjadi di mana pun.

Di sisi lain, dapat dipahami juga bahwa di era globalisasi dan persaingan dunia bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif, perusahaan dituntut memiliki *Good Corporate Governance* yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana perusahaan berperilaku dan bertindak dalam menghadapi persaingan (Antosius, 2003: 1).

2.2.2 Maksud dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia merupakan acuan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam rangka:

1. mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan
2. mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham
3. mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan
5. mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun secara internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

2.2.3 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan ini perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu, negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (FCGI, 2001). Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah sebagai berikut.

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten.
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab.

2.2.4 Asas *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Zarkasyi (2008: 39) mengemukakan bahwa ada lima asas dalam *Good Corporate Governance* sebagai berikut.

a) Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasarnya adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang

material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh undang-undang tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar adalah perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Realisasi dari prinsip ini dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan komisaris dan juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal. Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip ini.

c) Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara keseimbangan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholders* dan *stakeholders*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan

yang hendak dicapai dapat direalisasikan yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti asosiasi bisnis, pemerintah dan masyarakat.

d) Indenpendensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Untuk dapat terlaksananya prinsip ini diperlukan ketersediaan peraturan yang melindungi kepentingan berbagai pihak, membuat pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam. Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit serta penyajian informasi terutama laporan keuangan dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan/kewajaran ini.

2.3 Kualitas Laba

Menurut Schipper dan Vincent (2003) dalam Arif dan Bambang (2009), laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan ini juga menjadi alat bagi perusahaan dalam menyampaikan

informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik.

Di dalam laporan keuangan terkandung informasi tentang laba perusahaan. Laba adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu periode yang dapat dinikmati asalkan kemakmuran awal masih tetap dipertahankan. Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laba dikatakan berkualitas tinggi apabila laba yang dilaporkan dapat digunakan oleh para pengguna untuk membuat keputusan terbaik.

Kualitas laba merupakan salah satu aspek penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini karena kualitas laba mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya pada saat ini dan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang.

2.4 Dimensi *Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Adanya tatakelola yang baik diharapkan bahwa perusahaan akan dinilai dengan baik oleh *stakeholders*.

Ada empat dimensi *Good Corporate Governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, proporsi

komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

2.4.1 Komite Audit

Pasar audit yang semakin kompleks dan kompetitif, standar akuntansi yang makin ketat dan berbagai tuntutan pengungkapan di seluruh dunia turut dalam mendorong reformasi *Good Corporate Governance*. Dalam rangka penyelenggaraan *Good Corporate Governance*, Bursa Efek Indonesia mewajibkan perusahaan *go public* yang tercatat wajib memiliki komite audit.

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Komite audit juga berperan sebagai penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dengan auditor mengenai interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai keseimbangan akhir sehingga laporan lebih akurat (Klien, 2002 dalam Suryana, 2005). Mc Mullen (1996) dalam Suryana (2005) menemukan bahwa komite audit berhubungan dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang saham karena kecurangan, lebih sedikit pelaporan kembali laba kuartalan, lebih sedikit tindakan ilegal, lebih sedikit pergantian auditor ketika terjadi selisih pendapat antara klien dengan auditor. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kesalahan

pelaporan, pelanggaran dan indikator lain dari laporan keuangan yang tidak andal cenderung tidak memiliki komite audit.

Klien (2003) dalam Suryana (2005) menguji apakah komite audit dan karakteristik dewan komisaris berhubungan dengan manajemen laba. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang negatif antara komite audit independen dan akrual tidak normal. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur dewan yang independen terhadap CEO efektif dalam memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan. Klien menjelaskan bahwa komite audit bertugas sebagai penengah dua pihak untuk menimbang dan sebagai penghubung pandangan yang berbeda antara manajemen dan auditor untuk mencapai keseimbangan akhir sehingga laporan keuangan lebih akurat.

2.4.2 Proporsi Komisaris Independen

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta tatakelola yang baik di dalam perusahaan. Manfaatnya akan dilihat dari premium yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika ternyata investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* juga akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkan atau mengungkapkan praktek *Good Corporate Governance* (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Kama dan Jensen (1983) dalam Ujiyanto dan Pramuka (2006) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta tatakelola perusahaan yang baik.

2.4.3 Kepemilikan Institusional

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.

Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusional dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kepentingan terhadap aktualisasi sesuai kepentingan manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan. Hal ini karena biasanya institusi mempunyai hak yang cukup besar sehingga mengambil proksi yang cukup besar pula atas kepemilikan saham suatu perusahaan. Peranan pemilik institusi dalam *Good Corporate Governance* adalah (a) mengarahkan dan memonitor kegiatan bisnis di mana mereka menanamkan dananya, (b) sebagai sumber informasi perusahaan, dan (c) memiliki hak dan kewajiban suara yang substansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.4.4 Kepemilikan Manajerial

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang bukan sebagai pemegang saham. Dua hal ini akan mempengaruhi manajemen laba sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan perusahaan yang mereka kelola.

Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan (Boediono, 2005).

Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

2.5 Pengaruh Keberadaan Komite Audit Terhadap Kualitas Laba

Dalam pencapaian *Good Corporate Governance* diperlukan komite audit yang efektif. Untuk membangun komite audit yang efektif maka prinsip dan landasan yang harus dipegang oleh komite audit meliputi independensi, transparansi dan *disclosure*, akuntabilitas dan tanggung jawab serta sikap yang

adil. Ada beberapa manfaat dari pembentukan komite audit dalam perusahaan. Pertama, dalam hal penyusunan laporan keuangan perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit ekstern. Kedua, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan resiko dan kontrol. Ketiga, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan yang baik penting dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas laba.

Komite audit membantu dewan komisaris perusahaan melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independen. Apabila komite audit bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya maka pengendalian yang diterapkan akan efektif. Pengendalian yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan laba yang berkualitas.

Penelitian Siallagan dan Machfoeds (2006) menyatakan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan. McMullen (1996) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Komite audit juga berperan dalam mengawasi proses

pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektivitas dari auditor. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan serta mampu mengoptimalkan mekanisme *check and balance* yang pada akhirnya ditujukan pada perlindungan yang optimum terhadap pemegang saham. Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

2.6 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba

Pengaruh dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja direksi yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Dewan komisaris yang kecil akan efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dengan dewan komisaris yang berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit berkomunikasi, sulit berkordinasi dalam membuat keputusan. Proporsi komisaris independen merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi. Melalui fungsi pengawasan, proporsi dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas.

Beasley (1996) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris dari luar dapat mengurangi kecurangan pelaporan keuangan daripada kehadiran komite audit. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran dewan dan karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Hubungan antara jumlah anggota dewan dengan kualitas laba yang dilaporkan oleh manajemen perusahaan didukung oleh perspektif fungsi *service* dan kontrol yang dapat diberikan oleh dewan. Fungsi *service* menyatakan bahwa dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan nasehat kepada manajemen (dan direksi). Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan (komisaris) diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku *opportunistic* manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Young *et al.*, 2001 dalam Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas

pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi serta memberikan nasihat bilamana diperlukan. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan perusahaan memiliki peran terhadap aktivitas pengawasan. Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris (Siallagan dan Machfoeds, 2006).

Salah satu persoalan yang sering timbul adalah adanya dewan direksi yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dewan komisaris. Padahal fungsi dewan komisaris adalah mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh Presiden Direktur tersebut. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan Presiden Direktur sangat dipengaruhi oleh independensi dari dewan komisaris tersebut (Lipton dan Lorsch, 1992 dalam Purwaningtyas, 2011).

Dewan komisaris harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), tugas dewan komisaris adalah: (1) mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, dan (2) memberikan nasihat kepada direksi.. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Lastanti, 2004 dalam Purwaningtyas, 2011).

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

2.7 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Laba

Dalam hubungannya dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibanding investor individual. Ada dua pendapat mengenai investor institusional. Pendapat pertama didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara (*transfer owner*) sehingga hanya berfokus pada laba sekarang. Perubahan pada laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika perubahan ini dirasakan kurang menguntungkan, investor institusional akan melikuidasi sahamnya. Investor institusional biasanya memiliki saham dalam jumlah yang besar sehingga jika terjadi likuidasi saham akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Pendapat kedua memandang investor institusional sebagai investor yang berpengalaman dan lebih berfokus pada laba masa akan datang (*future earnings*) yang relatif lebih besar dari laba sekarang. Investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lain (Shiller dan Pound (1989) dalam Rahmawaty dan Triatmoko (2007)).

Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangannya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga

potensi kecurangan dapat ditekan (Lastanti,2004 dalam Purwaningtyas, 2011). Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat *monitoring* efektif bagi perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2005 dalam Purwaningtyas, 2011). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

2.8 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kualitas Laba

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer. Manajemen yang berbeda akan menghasilkan besaran

manajemen laba yang berbeda antara manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental perusahaan yaitu intervensi pada penyusunan laporan keuangan perusahaan berdasarkan akuntansi akrual.

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa kualitas laba perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan mendorong manajer untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Dengan demikian akan mempersatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham dan hal ini berdampak positif terhadap kualitas laba perusahaan.

Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajemen akan membantu penyatuan kepentingan manajer dan pemegang saham sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya

akan semakin meningkat dan ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik ((Jensen dan Meckling, 1976).

Masalah yang sering ditimbulkan dari struktur kepemilikan ini adalah *agency conflict*, di mana terdapat kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai *decision maker* dan para pemegang saham sebagai *owner* dari perusahaan (Haruman, 2008 dalam Purwaningtyas, 2011). Hasil penelitian Jensen dan Meckling (1976) membuktikan bahwa variabel struktur kepemilikan saham oleh manajemen mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan.

Penelitian Siallagan dan Machfoeds (2006) mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accrual* menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kwandou (2011) dengan judul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laba (Study Empiris pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di BEI). Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *Corporate Governance* yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan tingkat *leverage* terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur. Variabel dependen yakni kualitas laba diukur dengan skala rasio yakni standar deviasi laba usaha dibagi dengan standar deviasi arus kas dari operasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba sedangkan proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan tingkat *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.

Mengacu pada penelitian di atas maka peneliti mengadakan penelitian mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laba dengan menggunakan rasio *cash flow from operation* terhadap *net income*. Semakin kecil rasio antara *cash flow from operation* dan *net income* akan memberikan gambaran laba yang semakin berkualitas (Penman, 2001 dalam Abdelghany, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh empat variabel independen yang terdiri dari keberadaan komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap variabel dependen yakni kualitas laba.

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoretis

